

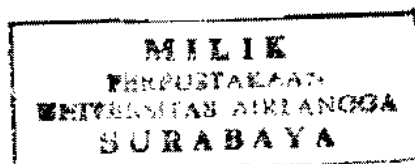
**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK MENGHADAPI OTONOMI
DAERAH DI ERA GLOBALISASI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK MENGHADAPI OTONOMI DAERAH
DI ERA GLOBALISASI**

DIAJUKAN OLEH:

SEMBRI AULIA RAHMI

No. Pokok: 040117237

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

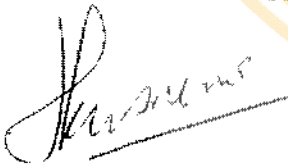
DOSEN PEMBIMBING,



Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, Msi.

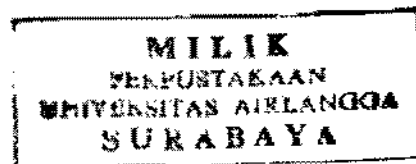
TANGGAL 6 Juni 2005

KETUA PROGRAM STUDI,



Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, Msi.

TANGGAL 6 Juni 2005



Surabaya, *21 April 2005*

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, Msi.



ABSTRAK

Adanya proses menuju era globalisasi, secara bertahap membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Hal ini diikuti dengan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Di sisi lain, proses globalisasi tersebut menyebabkan pola pembangunan menjadi *core competence*, yaitu pembangunan dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Bagi Kabupaten Gresik, pola pembangunannya lebih terkonsentrasi pada sektor industri dan perdagangan, mengingat industri merupakan potensi terbesar yang saat ini dimiliki. Kondisi ini terbukti dari jumlah PDRB sektor industri yang mengalami peningkatan selama periode pengamatan tahun 1996-2003.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gresik dapat diketahui dengan melihat indikator derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, posisi fiskal, serta rasio kemandirian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan data APBD, maka menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah. Proporsi penerimaan daerah secara rata-rata lebih didominasi oleh dana dari pemerintah (pusat), sedangkan peranan PAD kurang begitu besar. Peningkatan terhadap pengeluaran daerah, dalam hal ini akan menjelaskan tingkat kebutuhan fiskal Kabupaten Gresik yang meningkat. Kapasitas fiskal daerah yang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun ternyata tidak mampu mengimbangi besarnya kebutuhan fiskal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan posisi fiskal daerah yang dihitung dengan membandingkan kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal menunjukkan kondisi yang lemah.

Namun di satu sisi posisi fiskal melalui indikator pendekatan upaya fiskal, justru memperlihatkan adanya peningkatan Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPPAD) yang lebih besar terhadap TPADs Jawa Timur, berarti bahwa telah terjadi kenaikan PDRB melebihi kenaikan PAD Kabupaten Gresik. Bila posisi fiskal dilihat dari indikator elastisitas PAD terhadap PDRB, maka keadaan yang terlihat pada Kabupaten Gresik berdasarkan penelitian adalah elastis, yaitu dengan rasio sebesar 1,46% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB akan mempengaruhi pertumbuhan PAD.

Secara keseluruhan, dengan didasarkan pada penelitian terhadap kondisi keuangan daerah, maka Kabupaten Gresik bisa dikatakan kurang mampu melaksanakan otonomi daerah, di mana terlihat dari indikator rasio kemandirian yang memperlihatkan persentase yang kian menurun. Terlebih lagi pada periode akhir pengamatan tahun 2003, APBD menunjukkan kondisi defisit. Kendala pelaksanaan otonomi daerah selain dipengaruhi faktor keuangan, juga dipengaruhi oleh faktor sumberdaya manusia.